

BAB IV

PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan gambaran umum obyek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan penelitian. Hasil penelitian ini akan memberikan jawaban atas rumusan masalah dari penelitian ini.

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Pantai Parangtritis adalah obyek wisata pantai yang sangat terkenal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pantai Parangtriti terletak di Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pantai Parangtritis mempunyai keunikan yaitu pemandangan yang tidak terdapat pada obyek wisata lainnya yaitu ombak yang besar dan juga gunung pasir atau yang biasa masyarakat sebut sebagai gumuk pasir.

Tabel 4.1

Data Pendapatan Retribusi Obyek Wisata Pantai Parangtritis

Tahun	Target Pendapatan per Tahun	Besar Pendapatan	Prosentasi Pencapaian
2012	6,234,203,000	7,197,621,500	115,45
2013	7,641,223,000	7,673,335,000	100,42
2014	8,094,067,500	8,318,950,000	102,78
2015	9,201,735,000	9,478,437,500	103,01
2016	9,655,537,500	10,732,243,750	111,15

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.

Pengelolaan obyek wisata Pantai Parangtritis berada dibawah wewenang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul, namun sejak pemisahan Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata yang tertuang dalam Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, pengelolaan obyek wisata Pantai Parangtritis berada dibawah Dinas Pariwisata. Pemisahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ini dimaksudkan untuk peningkatan kinerja dan menfokuskan kerja satuan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang yang telah ditetapkan.

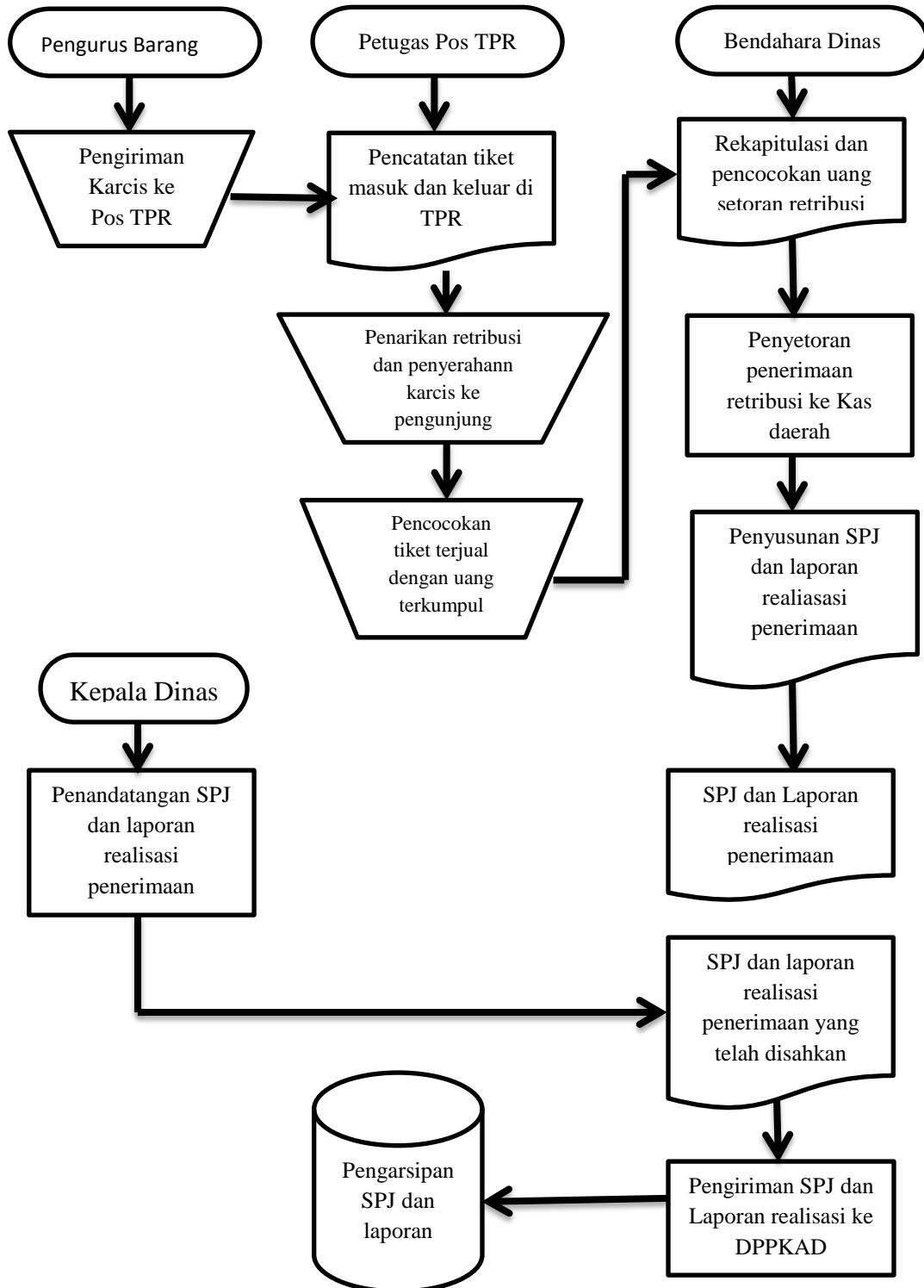
Dalam alur yang menjadi prosedur baku pelaksanaan kegiatan pemungutan retribusi obyek wisata tersebut disusun sejak bulan Mei 2013 dan efektif berjalan mulai bulan Juni 2013. Proses pemungutan retribusi obyek wisata yang berdasarkan standar operasional prosedur tersebut menjadikan tim pemungutan retribusi yang berada dilapangan selaku pelaksana tugas dilapangan sebagai ujung tombak dalam proses pemungutan retribusi obyek wisata.

Dalam Peraturan Daerah No.7 Tahun 2011 tentang Retribusi jasa usaha, pemerintah Kabupaten Bantul menetapkan biaya masuk obyek wisata Pantai Parangtritis sebesar Rp. 3.000,00 setiap pengunjung untuk sekali masuk. Pola pemungutan retribusi masuk obyek wisata Pantai Panrangtritis yang dilaksanakan selama ini menggunakan sistem karcis dimana setiap pengunjung diharuskan membayar biaya masuk sebesar jumlah karcis yang diberikan oleh petugas pemungut di pos retribusi yang telah disediakan.

Gambar 4.1

Prosedur Pemungutan Retribusi Obyek Wisata oleh Dinas Pariwisata

Kabupaten Bantul



Sumber: Data primer diolah.

B. Hasil Penelitian

A. Efektifitas sistem pengendalian internal pada retribusi obyek wisata obyek wisata Pantai Parangtritis Kabupaten Bantul.

Pada penelitian ini terdapat 7 pihak yang dapat dijadikan sebagai informan. 7 pihak tersebut adalah mereka yang berasal dari berbagai latar belakang yang berhubungan dengan penelitian ini seperti petugas pos induk retribusi obyek wisata Pantai Parangtritis, petugas pos retribusi Pantai Depok, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, anggota DPRD Kabupaten Bantul, Kanit Reskrim Polres Bantul, pegawai kelurahan Desa Parangtritis, dan warga sekitar pos retribusi obyek wisata Pantai Parangtritis. Informasi lengkap untuk para informan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.2

Daftar Informan

Narasumber	Usia (Thn)	Pendidikan Terakhir	Jabatan	Lama (Thn)
Narasumber 1	43	SMA	Koor. Pos TPR Pantai Parangtritis	12
Narasumber 2	47	SMA	Petugas Pos TPR Pantai Depok	5
Narasumber 3	57	S2	Kep.Dinas Pariwisata kab.Bantul	35
Narasumber 4	40	S2	Kanit 3 Reskrim Polres Bantul	21
Narasumber 5	50	S1	Anggota DPRD Kab.Bantul	8
Narasumber 6	38	SMA	Ka.Pemerintahan Ds.Parangtritis	4
Narasumber 7	27	S1	Ketua Pemuda Ds.Parangtritis	-

Menurut para informasi diperoleh beberapa data dan kesimpulan yang terkait dengan efektifitas sistem retribusi obyek wisata yang saat ini diterapkan pada obyek Pantai Parangtritis dan beberapa faktor yang mempengaruhi efektifitas dari penerapan sistem retribusi. Sebagai berikut :

1. Efektivitas sistem retribusi obyek wisata

Sistem retribusi obyek wisata yang saat ini digunakan oleh pemerintah Kabupaten Bantul yang dalam hal ini berada di bawah wewenang dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul adalah dengan menggunakan sistem pembayaran menggunakan karcis. Dalam pelaksanaan sistem pembayaran biaya masuk obyek wisata menggunakan karcis sudah berjalan tersebut ternyata masih belum bisa dikatakan berjalan secara efektif. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh informan N 1:

....untuk sistem masih kurang karena yang pertama tempat pemungutan retribusi berada di jalan provinsi yang menghubungkan dengan wilayah lain dengan bantul, kemudian didalam atau setelah tempat pemungutan itu masih banyak penduduk yang bermukim di situ dan kemudian yang ketiga masih terbatasnya jumlah petugas, jadi masih kurang.

Pendapat yang disampaikan oleh informan N 1 tersebut sama dengan apa yang disampaikan oleh informan N 2 yang menyatakan sebagai berikut :

...dikatakan efektif sudah tapi masih kurang karena tenaga personelnnya itu masih kurang...pertama faktor petugas terutama pada hari liburan sabtu dan minggu masih tetap kurang masih membutuhkan.

Apa yang disampaikan oleh informan N 1 dan N 2 yang merupakan petugas pelaksana dilapangan bisa menjadi gambaran awal apakah sistem retribusi yang selama ini dilakukan telah berjalan secara efektif atau belum.

Keberadaan pos retribusi obyek wisata yang berada di jalur jalan provinsi yang menghubungkan antara 2 kabupaten kemudian keberadaan rumah penduduk yang berada setelah pos retribusi obyek wisata dan keterbatasan personel menjadi penyebab kurang efektifnya pelaksanaan sistem retribusi obyek wisata.

Hal berbeda justru diungkapkan oleh beberapa informan terkait dengan kurang efektifnya pelaksanaan penarikan retribusi obyek wisata Pantai Parangtritis. Seperti yang diungkapkan oleh informan N 5 sebagai berikut:

...kita mustinya retribusinya dengan tiket cuma masih belum efektifnya adalah adanya kebocoran-kebocoran dan adanya hal-hal yang tidak maksimal dilakukan baik itu pengawasan dan pengawalan yang dilakukan oleh dinas terkait.

Belum efektifnya sistem retribusi obyek wisata dikarenakan oleh masih adanya kebocoran-kebocoran yang terjadi yang disebabkan oleh kurang pengawasan dan pengawalan yang dilakukan oleh dinas terkait. Informan N 6 memberikan pernyataan sebagai berikut:

...jadi gini tentang untuk pemungutan untuk masuk wisata ke parangtritis untuk sekarang memang menggunakan sistem karcis yang nantinya itu sudah ditarget untuk PAD yang dari wisata parangtritis dengan adanya sistem menggunakan karcis itu sebetulnya sudah efektif ketika petugasnya itu benar-benar setiap pengunjung diberikan karcis tanda masuk....

Sistem retribusi obyek wisata sudah efektif ketika petugas pelaksana dilapangan dapat melaksanakan tugas yang sudah diberikan dapat dilaksanakan secara benar. Informan N 7 memberikan pernyataan sebagai berikut:

...kurang efektif dikarenakan oleh masih adanya oknum petugas tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya..seperti membiarkan pengunjung yang masuk atau malah berusaha mengambil keuntungan pribadi dari tugas yang diembankan kepada mereka.

Peran petugas pelaksana dilapangan menjadi penting apakah sistem retribusi ini dapat berjalan dengan efektif atau tidak. Pernyataan berbeda justru disampaikan oleh informan N 4 yang sebagai berikut:

...kalo dilapangan untuk saat ini sudah berjalan dengan baik..kaitan dengan tiket dengan petugas disana sudah cukup baik dan itu terbukti dengan adanya setor kaitan dengan PAD itu melebihi daripada target yang telah ditentukan kabupaten bantul.

Sistem retribusi sudah berjalan dengan baik dan efektif dilihat dari capaian pendapatan retribusi obyek wisata yang sudah melampaui target yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan informan diatas, maka sistem retribusi obyek wisata Pantai Parangtritis dikatakan berjalan dengan efektif ketika pendapatan yang diperoleh telah mampu memenuhi atau melampaui target yang sudah ditetapkan. Tetapi sistem retribusi tersebut secara pelaksanaan dilapangan masih belum bisa berjalan efektif karena masih adanya kendala yang dapat menyebabkan tidak maksimalnya pelaksanaan dan adanya kebocoran yang dapat mengurangi pendapatan yang berasal dari pendapatan retribusi obyek wisata yang ada di Pantai Parangtrits.

2. Efektivitas sistem retribusi terhadap potensi pariwisata

Kawasan obyek wisata pantai parangtritis memiliki karakteristik yang berbeda jika dibandingkan dengan obyek wisata pantai yang ada ditempat lain. Karakteristik yang terdapat pada kawasan obyek wisata pantai

parangtritis tersebut adalah terdapatnya 3 obyek wisata pantai yang memiliki karakteristik yang berbeda tetapi saling melengkapi. Karakteristik-karakteristik tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Obyek wisata Pantai Parangtritis yang memiliki karakteristik pemandangan alam.
- b. Obyek wisata Pantai Parangkusumo yang memiliki karakteristik wisata kebudayaan yang erat kaitannya dengan Kraton Yogyakarta.
- c. Obyek wisata Pantai Depok yang memiliki karakteristik wisata kuliner dan tempat pelelangan ikan.

Dengan karakteristik yang berbeda namun berada dalam satu wilayah menjadikan kawasan obyek wisata pantai parangtritis memiliki potensi yang besar untuk dapat menjadi pemasukan bagi Pemerintah Kabupaten Bantul.

Namun dalam pengelolaannya selama ini, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul tidak memiliki analisis terkait potensi pariwisata tersebut. Sehingga pemasukan dari kawasan obyek wisata pantai parangtritis masih bertumpu pada retribusi masuk obyek wisata pantai.

Tidak adanya analisis terkait dengan potensi pariwisata yang terdapat pada kawasan obyek wisata pantai parangtritis tersebut terlihat dari bagaimana Dinas Pariwisata dalam menetapkan target penerimaan yang berasal dari retribusi obyek wisata. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh informan N 5, sebagai berikut:

satu kelemahan pemda hanya berdasarkan angka tahun lalu kalo misalnya tahun lalu itu targetnya yang tercapai adalah X

kemudian target terlampaui menjadi X+1 nah akan menjadi X+1 ditambahkan sedikit nah ini yang menjadi tidak maksimal. Potensinya tidak dibaca betul dilapangan tidak diamati betul potensi itu sehingga kadang-kadang asal sudah naik tetapi naik yang sesungguhnya belum realistis masih bisa dikejar.

Dengan cara penetapan target yang demikian maka potensi yang terdapat pada obyek wisata pantai parangtritis tidak dapat digali secara maksimal.

Tidak adanya analisis potensi pariwisata dalam penetapan target penerimaan dapat disebabkan karena dinas tersebut masih membidangi 2 hal, yaitu bidang pariwisata dan bidang kebudayaan. Sehingga diharapkan dengan bidang kebudayaan yang sekarang telah dipisah menjadi Dinas Kebudayaan, maka diharapkan Dinas Pariwisata dapat lebih konsen dalam mengelola pariwisata yang terdapat pada di Kabupaten Bantul. Hal tersebut seperti yang kembali diungkapkan oleh informan N 5, sebagai berikut:

...nah mudah-mudahan dengan OPD baru yang namanya dinasnya berdiri sendiri dinas pariwisata akan lebih konsen lha kalo nggak konsen mau ngurus apa, kalo kemarin kan bersama kebudayaan hari ini konsen disitu harusnya konsen pada peningkatan kawasan wisatanya fasilitas dst dan penataan untuk tidak bocor.

Sehingga dengan dipisahanya tugas antara kebudayaan dan kepariwisataan, dapat menjadi solusi agar Dinas Pariwisata dapat mengoptimalkan potensi pariwisata yang ada dan dapat lebih efektif dalam menjalankan sistem retribusi obyek wisata untuk peningkatan penerimaan daerah dari sektor pariwisata.

Karena dalam efektivitas sistem retribusi obyek wisata pantai parangtritis dimulai dari penetapan target penerimaan dan pelaksanaan

sistem retribusi obyek wisata dalam upaya untuk meningkatkan pemasukan daerah dari sektor pariwisata.

Tabel 4.2

Tingkat Efektifitas Sistem Retribusi Obyek Wisata

Tingkat Efektivitas	N 1	N 2	N 3	N 4	N 5	N 6	N 7	Jumlah
Efektif	-	-	-	-	-	-	-	-
Cukup Efektif	-	-	-	v	-	v	-	2
Kurang Efektif	V	v	v		V		v	5

Sumber : data primer diolah

B. Bentuk kebocoran pada sistem retribusi obyek wisata Pantai Parangtritis Kabupaten Bantul.

Menurut informasi yang diperoleh, ada beberapa bentuk kebocoran yang terjadi pada proses pemungutan retribusi obyek wisata Pantai Parangtritis. Selain karena faktor kendala seperti yang sudah dijelaskan diatas, bentuk kebocoran yang sering terjadi adalah berupa kecurangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum petugas retribusi obyek wisata pantai parangtritis.

Hal tersebut terungkap dengan tertangkapnya 2 orang oknum petugas retribusi obyek wisata pantai parangtritis dalam operasi saber pungli yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Bantul pada pertengahan bulan Januari 2017.

Terungkapnya tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum petugas retribusi tersebut seperti yang diungkapkan oleh informan N 4 sebagai berikut:

...yang jelas kebocoran itu ketika kita melakukan penindakan itu kita temui ada tiket yang dijual dihari-hari yang lampau dijual kembali saat kita melakukan penindakan itu.

Kebocoran yang ditemukan saat penindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian menemukan adanya petugas pos retribusi yang menjual tiket yang telah dijual dihari yang lampau untuk kemudian dijual kembali pada hari saat terjadinya penindakan. Selain itu informasi yang diperoleh dari informan N 4 diperkuat oleh informan N 7 sebagai berikut:

...bentuknya biasanya yang kita ketahui adalah dengan menjual tiket bekas yang dipungut di pantai atau tiket yang tertinggal dipenginapan untuk kemudian dijual kembali dihari lain.

Selain dengan menjual tiket bekas yang telah dijual dihari yang lampau, juga terungkap bahwa bentuk kebocoran lain yang dilakukan oleh oknum petugas pos retribusi adalah dengan cara memberikan karcis masuk yang tidak sesuai dengan apa yang dibayarkan oleh pengunjung. Seperti apa yang diungkapkan oleh informan N 4 sebagai berikut:

...ada juga temuan dilapangan kaitan dengan kebocoran sebagai contoh dalam satu rombongan ada sekitar 50 orang dari pihak wisatawan membayar dengan jumlah yang sesuai dengan penumpang tapi tiket yang diberikan tidak sesuai dengan yang daripada dibayarkan...contoh dari 50 yang harusnya diberikan...mereka hanya diberi 40 tiket. Artinya ada keuntungan yang masuk ke pribadi mereka yang seharusnya diberikan sesuai dengan yang dibayarkan.

Kebocoran yang disebabkan oleh tindakan oknum petugas pos retribusi obyek wisata dengan memberikan jumlah tiket yang tidak sesuai dengan yang

dibayarkan oleh pengunjung tersebut menjadikan bukti adanya lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata terhadap petugas pelaksana dilapangan .

Lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata tersebut sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh informan N 5, sebagai berikut:

...adanya hal-hal yang tidak maksimal dilakukan baik itu pengawasan dan pengawalan yang dilakukan oleh dinas terkait.

Begitupun dengan informan N 3 yang memberikan pernyataan sebagai berikut:

...kalo dinas belum kalo aparat internal bawasada sudah ada, kepolisian sudah ada. Ya itu sampai maret itu baru akan bentuk.

Dengan tidak adanya pengawasan yang dilakukan dari dinas tersebut menyebabkan terjadinya kebocoran yang dilakukan dari internal Dinas Pariwisata yang dalam hal ini adalah petugas pos retribusi obyek wisata Pantai Parangtritis. Bentuk kebocoran yang dilakukan oleh petugas pemungut retribusi, dapat menjadi sebuah evaluasi yang perlu dilakukan oleh dinas pariwisata.

Bentuk-bentuk kebocoran yang terjadi dalam proses pemungutan retribusi obyek wisata Pantai Parangtritis tidak saja terjadi karena disebabkan oleh faktor insfrastruktur, seperti lokasi pos retribusi yang berada di jalan jalur lintas provinsi dan adanya permukiman penduduk yang berada setelah pos retribusi. Tetapi juga terjadinya kebocoran karena disebabkan oleh lemah pengawasan yang dilakukan.

Dengan teridentifikasinya permasalahan yang menyebabkan kebocoran dalam proses pemungutan retribusi obyek wisata. Dinas Pariwisata Kabupaten

Bantul perlu segera melakukan langkah-langkah evaluasi agar permasalahan yang terjadi dilapangan tidak terulang kembali.

C. Upaya untuk peningkatan Sistem Pengendalian Internal pada retribusi obyek wisata Pantai Parangtris Kabupaten Bantul.

Dalam upaya untuk meningkatkan sistem pengendalian internal pada sistem retribusi obyek wisata pantai parangtritis, pemerintah daerah perlu memperhatikan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam proses pemungutan retribusi obyek wisata. Kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat terjadi karena faktor sumber daya manusia atau faktor infrastruktur yang terdapat pada wilayah sekitar obyek wisata.

1. Kendala pada sistem retribusi obyek wisata

Dalam proses pemungutan retribusi obyek wisata yang dilakukan oleh Dinas Kabupaten Bantul menemui beberapa kendala yang dihadapi dilapangan. Kendala-kendala yang terjadi lapangan tersebut yang menjadikan proses pemungutan retribusi yang dilakukan berjalan kurang efektif. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh informan N 1, sebagai berikut:

...Bisa dikatakan kurang efektif karena kita masih sering menemui pengunjung yang seharusnya membayar jadi tidak membayar karena ingin melewati saja untuk masuk wilayah gunungkidul maupu ketempat saudara yang bermukim di setelah tempat pemungutan.

Masih ditemukannya pengunjung yang tidak melakukan pembayaran ini lebih disebabkan karena mereka hanya ingin melewati karena ingin berkunjung ke wilayah Kabupaten Gunung Kidul atau untuk berkunjung kerumah saudara yang bermukim dikawasan setelah pos retribusi obyek wisata.

Pernyataan tentang keberadaan permukiman yang berda setelah pos retribusi juga diungkapkan oleh infroman N 2, sebagai berikut:

...kan dijalan umum to mas yang disana...kalo sini yang sulit untuk mengetahui mana yang pengunjung mana yang warga.

Kendala yang disebabkan oleh keberadaan pos retribusi dijalan provinsi dan keberadaan permukiman setelah pos juga disampaikan oleh infroman lain yang merupakan warga sekitar pos retribusi. Informan N 6 menyampaikan, sebagai berikut:

...jadi ketika itu TPR berada di tempat yang sekarang berada itukan di jalur umum yang menuju ke wilayah lain misalnya gunung kidul..jadi dari warga sendiri yang mau masuj ke parangtritis kita mau ke gunung kidul.

Sementara informan N 7 menyatakan bahwa kendala yang dihadapi tersebut menjadi celah akan kebocoran yang terjadi. Pernyataaan informan N 7, sebagai berikut:

...jadi kendalanya itu karena lokasi pos TPR ada di jalan provinsi antara Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Gunung kidul kemudian setelah pos itu masih banyak rumah penduduk itu yang biasa menyebabkan terjadinya kebocoran yang sering terjadi.

Masih banyaknya permukiman serta keberadaan pos retribusi yang terletak dijalan jalur lintas provinsi yang menghubungkan anatara

kabupaten Bantul dengan Kabupaten Gunung kidul tersebut yang menjadi sebuah kendala yang dihadapi oleh petugas yang berada dilapangan.

Permasalahan lain kemudian timbul ketika keberadaan pos retribusi yang berada di jalan jalur lintas provinsi pada saat waktu liburan. Ketika memasuki waktu liburan antrean masuk yang berada di pos retribusi menyebabkan kemacetan panjang. Kemacetan panjang ini yang akhirnya menjadi penyebab pihak pos retribusi dan kepolisian untuk membuka pos retribusi tanpa memungut biaya masuk. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh N 5 sebagai berikut:

...kalo kaitan dengan seperti itu begini...dari pihak kepolisian melakukan demikian karena melihat situasi dilapangan..contohnya seperti ini terjadi kemacetan panjang dan mengganggu arus lalu lintas yang lain karena mereka kan dari petugas TPR itu jumlah personel tidak banyak....tidak sebanding dengan pengunjung yang datang akhirnya kepolisian mengambil tindakan deskresi yang melolosakan itu upaya agar tidak terjadi kemacetan yang lebih parah lagi...bisa dibayangkan kalo untuk masuk TPR kemacetan sampai berapa kilo contoh sampai didaerah dari tpr sampai lampu merah. macet itu kalo enggak diloloskan artinya polisi tidak mengambil upaya deskresi itu akan semakin panjang kemacetan yang terjadi tentunya akan mengganggu ketertiban umum apalagi kelancaran lalu lintas..disatu sisi memang itu menjadi kendala kaitan dengan PAD yang masuk tapi disisi lain itu tindakan polisi benar dalam arti kita meloloskan dengan pertimbangan dan dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan pertimbangan untuk menjaga ketertiban umum dan kelancaran lalu lintas tersebut yang akhirnya membuat pihak kepolisian untuk membuka pos retribusi obyek wisata tanpa dipungut biaya masuk. Secara kebijakan, langkah yang diambil tersebut menjadi konsekuensi terhadap pendapatan dari retribusi obyek wisata yang kurang efektif.

Selain karena faktor yang disebabkan karena keberadaan pos retribusi yang berada di jalur jalan provinsi yang menghubungkan antara Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul, permukiman yang berada setelah pos retribusi dan kemacetan yang timbul. Kendala lain yang terjadi adalah masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh dinas terkait terhadap pelaksanaan petugas pemungutan retribusi. Hal tersebut seperti apa yang diungkapkan oleh informan N 3, sebagai berikut:

...Kalo dinas belum kalo aparat internal bawasda sudah ada, kepolisian sudah ada. Ya itu sampai maret itu baru akan bentuk

Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata tersebut juga sesuai dengan yang diungkapkan oleh informan N 5, sebagai berikut:

...adanya hal-hal yang tidak maksimal dilakukan baik itu pengawasan dan pengawalan yang dilakukan oleh dinas terkait.

Lemahnya pengawasan yang dilakukan tentu menjadi kendala dalam mengoptimalkan pendapatan yang berasal dari retribusi obyek wisata. Karena dengan kurangnya pengawasan yang dilakukan dilapangan tentu akan menimbulkan kebocoran yang terjadi pada proses pelaksanaan dilapangan.

Keberadaan pos retribusi yang berada di jalur jalan provinsi, permukiman penduduk serta kemacetan yang timbul pada hari-hari tertentu terutama saat liburan ini yang menjadi kendala dalam proses pemungutan retribusi obyek wisata Pantai Parangtritis.

Dengan kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pemungutan retribusi obyek wisata pantai parangtritis tersebut, maka pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata yang bertanggung jawab dalam pengelolaan obyek wisata perlu melakukan langkah-langkah evaluasi dalam upaya untuk meningkatkan pengendalian dalam sistem retribusi obyek wisata.

Tabel 4.3

Kendala Pada Proses Pemungutan Retribusi Obyek Wisata

Kendala	N 1	N 2	N 3	N 4	N 5	N 6	N 7	Jumlah
Lokasi Pos Retribusi	V	V	-	v	-	v	v	5
Kemacetan	V	-	-	v	-	-	-	2
Pengawasan	-	-	v	-	V	-	-	2

Sumber : data primer diolah

2. Upaya peningkatan pengendalian internal dalam retribusi obyek wisata

Dalam sistem pengendalian internal pemerintahan, ketika permasalahan yang terjadi dalam suatu sistem telah teridentifikasi maka perlu dilakukan sebuah upaya sebagai pengendalian. Upaya pengendalian tersebut juga dapat sebagai langkah dalam melakukan peningkatan. Sehingga permasalahan-permasalahan yang terjadi tidak kembali terjadi.

Dalam proses pemungutan retribusi obyek wisata Pantai Parangtritis, permasalahan-permasalahan yang selama ini terjadi perlu untuk segera dilakukan perbaikan. Langkah sangat penting mengingat selama ini Pantai Parangtritis masih menjadi tumpuan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam memperoleh pendapatan yang berasal dari retribusi obyek wisata.

Sebagai upaya peningkatan pengendalian internal pada retribusi obyek wisata pantai parangtritis ada beberapa langkah evaluasi yang perlu dilakukan, sebagai berikut:

a. Peningkatan sumber daya manusia

Kemampuan sumber daya manusia dalam pelaksanaan sebuah sistem memiliki peranan yang sangat penting. Hal tersebut dikarenakan oleh bahwa dalam sistem retribusi obyek wisata pantai parangtritis masih sangatlah bergantung pada peran manusia sebagai komponen utama sebagai pelaksana. Seperti pernyataan yang diungkapkan oleh informan N 4, sebagai berikut:

...lebih kembali kepada SDMnya...walaupun sudah dicegah dengan cara seperti apapun seperti dengan pemasangan CCTV nanti dengan tiket yang menggunakan apalah itu yang bisa mencegah kebocoran...tapi kalo dari manusianya sendiri mentalnya tidak kuat dalam arti masih mengharapkan keuntungan daripada yang dia lakukan ya sama saja...kalo pertimbangan lain kan bisa juga seperti kesejahteraan.

Peningkatan sumber daya manusia dalam sistem retribusi obyek wisata pantai parangtritis menjadi sebuah hal penting untuk

dilakukan. Sebab keberhasilan sistem tersebut terletak pada bagaimana manusia dalam menjalankan sistem tersebut. Informan N 7 memberikan pernyataan sebagai berikut:

...Lokasi pos itu harusnya bisa lebih dekat dengan lokasi pantai kemudian adanya pengawasan yang dilakukan sungguh-sungguh dan juga SDM dari para petugasnya itu perlu untuk di tingkatkan.

Peningkatan SDM petugas pelaksana pemungutan retribusi obyek wisata tidak hanya berupa dengan pemahaman dalam menjalankan sistem, melainkan juga termasuk mental petugas agar tidak mencoba mencari keuntungan untuk diri sendiri. Sebab dalam sistem para petugas memiliki akses terhadap uang retribusi yang masuk. Sehingga dengan tidak ada pembinaan mental petugas tentu dapat menyebabkan terjadi kebocoran terhadap pendapatan dari retribusi obyek wisata.

b. Pengawasan

Dalam sebuah sistem yang pelaksanaannya melibatkan sebuah tim pelaksana satuan tugas, tentu diperlukan sebuah pengawasan terhadap pelaksanaan yang terjadi dilapangan. Hal tersebut dilakukan karena potensi permasalahan yang terjadi. Sehingga pengawasan dilakukan agar petugas pelaksana dilapangan dapat menjalankan tugas dan fungsinya.

Informan N 3 memberikan pernyataan sebagai berikut:

...sejak saya masuk mencari cara-cara atau sistem yang paling efektif kebetulan ada yang tertangkap OTT awal januari kemudian saya selaku kepala...baru masuk 2

minggu udah ada yang OTT saya berpikir bagaimana meningkatkan pengawasan internal untuk TPR parangtritis dll saya punya ide bahwa mulai maret tiket bahwa akan kami beri tulisan apabila tiket anda tidak sesuai tanggal pembelian dan uang pembelian harap lapor ke nomor jadi pengawasannya terletak pada saya dan sekretaris dan untuk sabtu-minggu harus ada pengawasan langsung karena ada yang kongkalikong dengan bus-bus besar.

Pengawasan dapat dilakukan secara internal oleh Dinas Pariwisata, tetapi juga dapat melibatkan peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem retribusi obyek wisata. Dengan dilakukannya peningkatan pengawasan diharapkan dapat mengatasi kebocoran yang terjadi pada pelaksanaan sistem retribusi obyek wisata pantai parangtritis.

c. Evaluasi keberadaan pos retribusi

Selama ini keberadaan pos retribusi yang berada pada jalur jalan provinsi yang menghubungkan antara Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul menjadi salah satu penyebab kurang maksimalnya pelaksanaan pemungutan biaya masuk obyek wisata. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan informan N 6, sebagai berikut:

...untuk tempat pemungutan tanda masuk itu kalo mau efektif dibuat ditempat-tempat masuk, misal seperti parangkusomo, depok sana. Efektif kalo ditempat-tempat untuk masuk.

Selama ini posisi dari pos retribusi memiliki jarak yang cukup jauh dari obyek wisata. Selain itu juga setelah pos retribusi masih ada permukiman penduduk yang menyebabkan kurang maksimalnya dalam pemungutan biaya masuk obyek wisata.

Selain itu rencana pembangunan jalan jalur lintas selatan jawa yang berada di sisi selatan pos retribusi juga perlu menjadi pertimbangan. Sehingga upaya untuk mamaksimalkan pendapatan dari retribusi obyek wisata adalah dengan cara memindahkan pos retribusi untuk lebih dekat dengan obyek wisata dan tidak berada pada jalan umum. Sehingga ada perbedaan antara pengunjung obyek wisata, penduduk sekita obyek wisata, atau warga yang hanya sekedar lewat untuk menuju Kabupaten Gunung Kidul.

d. Perbaikan infrastruktur

Infrastruktur penunjang seperti pos retribusi, penerangan dan infrastruktur lain perlu adanya peningkatan. Terlebih tingkat kunjungan wisatawan untuk berkunjung ke obyek wisata pantai parangtritis sangat tinggi. Seperti pernyataan yang dikemukakan oleh informan N 1, sebagai berikut:

...kita dilapangan tentu saja berkomunikasi dengan pimpinan kami, bahwa setiap akhir tahun itu kemacetan selalu terjadi, apa alasannya pengunjung semakin tahun semakin banyak, kendaraan semakin banyak sedangkan insfrastrukturnya tetap saja apalagi kita kendala dengan tempat pemungutan itu karena tidak jauh dari tempat pemungutan sudah ada jembatan.

Selain itu informan N 2 juga menyatakan sebagai berikut:

...fasilitas mas...ini kan masih ada yang kurang seperti dispenser gag ada disini...toilet kan jauh disana terus...sini kan mintanya itu..terus lampu penerangan.

Dengan perbaikan yang dilakukan pada infrastruktur diharapkan akna dapat memaksimalkan proses pemungutan retribusi

obyek wisata pantai parangtritis. Sebab, selain SDM dan pengawasan. Suatu sistem dapat berjalan secara maksimal apabila dapat ditunjang dengan infrastruktur yang memadai.

e. Diserahkan kepada pihak ketiga

Usulan untuk pengelolaan retribusi obyek wisata diserahkan kepada pihak ketiga muncul karena melihat potensi yang selama ini dimiliki oleh obyek wisata pantai parangtritis kurang terserap secara maksimal. Sehingga diharapkan dengan menyerahkan pengelolaan kepada pihak ketiga akan dapat memaksimalkan pendapatan yang berasal dari obyek wisata. Informan N 5 menyatakan sebagai berikut:

...mustinya hari ini dengan dibentuknya saber pungli adalah kesempatan dewan menggandeng dinas terkait untuk memberikan masukan lalu dewan mengundang dinas untuk hal ini jelas targetnya harus jelas karena dinas itu kadang kalo dinaikkan targetnya ketakutan tidak berani tetapi kenyataan dilapangan potensinya sungguh besar sesungguhnya ini yang tidak balance maka harus didiskusikan, kalo dipihak ketigakan terjadi diskusi lalu negosiasi nah kalo kemarin terjadi OTT inilah pengawasan yang sangat lemah tadi khususnya dewan yang membidani pariwisata yaitu komisi B harus ketat

Selain itu informan N 5 juga menambahkan sebagai berikut:

...sehingga kalau ada wacana diserahkan ke pihak ketiga itu saya sepakat dengan catatan target retribusi yang maksimal, sistem pembayaran pemenang kontrak itu harus jelas baik itu di muka, di tengah atau triwulan, transparansi pemenang lelang sehingga target-target yang demikian itu harus dikomunikasikan dengan baik dengan dewan kalo dengan sistem kontrak ada nilai pasti.

Wacana untuk menyerahkan pengelolaan dan pemungutan retribusi obyek wisata pantai parangtritis kepada pihak ketiga telah ada

sejak lama yang sampai sekarang belum terrealisasi dan tidak menjamin keberhasilan dalam peningkatan pendapatan serta belum tentu dapat meminimalkan kebocoran yang terjadi. Pendapat tersebut muncul dari informan N 3 yang menyatakan sebagai berikut:

...sejak dulu tapi tidak pernah berhasil Cuma mengulang, saya yakin sistem saya akan berhasil

Terlepas dari setuju atau tidak setuju terhadap wacana untuk menyerahkan pengelolaan kepada pihak ketiga. Perlu adanya pertimbangan, sebab potensi saat ini ada pada obyek wisata pantai parangtritis belum dapat teroptimalkan secara maksimal karena adanya kebocoran yang disebabkan kurangnya pengendalian internal dalam proses pelaksanaan pemungutan retribusi obyek wisata pantai parangtritis. Karena obyek wisata parangtritis selama ini memang merupakan tumpuan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam pendapatan daerah dari sektor pariwisata.

Tabel 4.4

Upaya Peningkatan Pengendalian Pada Retribusi Obyek Wisata

Upaya	N 1	N 2	N 3	N 4	N 5	N 6	N 7	Jumlah
Peningkatan SDM	-	-	-	v	-	-	v	2
Pengawasan	-	-	v	-	-	-	v	2
Evaluasi pos retribusi	v	-	-	-	-	v	-	2
Peningkatan infrastruktur	v	v	-	-	-	-	-	2

Diserahan kepada Pihak Ketiga	-	-	v	-	v	-	-	2
-------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

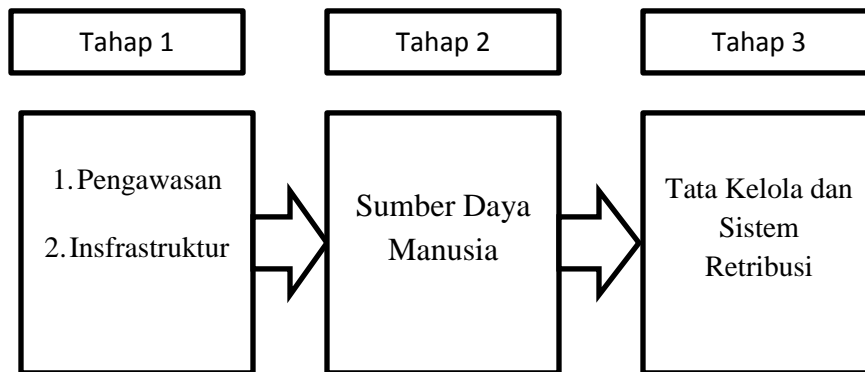
Sumber: data primer diolah

D. Upaya peningkatan dan perbaikan sistem retribusi obyek wisata di Kabupaten Bantul berdasarkan hasil penelitian

Berdasarkan temuan dan hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan sejumlah langkah yang perlu dilakukan dalam upaya untuk peningkatan pengendalian internal dalam sistem retribusi obyek wisata Pantai Parangtritis. Langkah-langkah perbaikan tersebut berupa perbaikan baik dalam sistem retribusi obyek wisata, peningkatan sumber daya manusia dan infrastruktur yang tergambar dalam pola sebagai berikut:

Gambar 4.2

Tahapan Dalam Peningkatan Sistem Retribusi Obyek Wisata Pantai Parangtritis.



1. Peningkatan Tahap Pertama

Peningkatan sistem retribusi obyek wisata pada tahap pertama ini adalah dengan melakukan evaluasi dan peningkatan terhadap permasalahan yang ditimbulkan dari lemahnya pengawasan dan insfrastruktur.

a. Pengawasan

Kebocoran-kebocoran yang saat ini terjadi dalam proses pemunggutan retribusi biaya masuk obyek wisata adalah disebabkan oleh lemah pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata. Kecurangan yang dilakukan oleh petugas retribusi obyek wisata seperti yang telah diungkap oleh informan 4 adalah akibat yang timbul dari lemahnya pengawasan.

Dengan permasalahan yang timbul tersebut maka langkah awal yang perlu dilakukan adalah dengan peningkatan pengawasan yang dilakukan oleh dinas terkait. Dengan peningkatan pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan dilapangan maka akan dapat diharapkan mampu mengatasi permasalahan kebocoran yang terjadi dari internal pelaksana, yang dalam hal ini adalah petugas pos retribusi obyek wisata.

b. Insfrastruktur

Langkah evaluasi dan perbaiki selanjutnya dalam tahap awal dalam upaya peningkatan pengendalian terhadap sistem retribusi obyek wisata adalah perbaiki dan peningkatan insfrastruktur. Langkah tersebut dilakukan terkait permasalahan-permasalahan yang

timbul, seperti faktor letak pos retribusi yang berada di jalan umum, banyaknya keberadaan permukiman penduduk setelah pos retribusi dan kemacetan yang timbul akibat antrean untuk melewati pos retribusi.

Langkah perbaikan tersebut seperti dengan pemindahan pos retribusi obyek wisata. Pemindahan pos retribusi obyek wisata menjadi sangat penting, terlebih dengan adanya rencana pembangunan jalan jalur lintas selatan Jawa yang letak berada disebelah selatan pos retribusi. Pemindahan pos retribusi obyek wisata juga dilakukan dengan memperhatikan jarak antara pos retribusi agar lebih dekat dengan lokasi obyek wisata serta pertimbangan keberadaan permukiman penduduk.

2. Peningkatan tahap kedua

Pada peningkatan tahap ini berupa peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Peningkatan sumber daya manusia yang dimaksud adalah dengan memberikan kemampuan dalam mengatasi persoalan yang terjadi dilapangan seperti kemacetan atau kemampuan dalam pengelolaan tiket retribusi berbasis komputer. Terkait kemampuan pengelolaan tiket yang berbasis pada komputer ini sebagai langkah awal dalam upaya perbaikan sistem retribusi obyek wisata yang dilakukan dalam tahap selanjutnya.

3. Peningkatan tahap ketiga

Pada pengelolaan tahap ketiga ini berupa memperbaiki tata kelola dan sistem retribusi obyek wisata. Yang dimaksud dengan perbaikan tata kelola dan sistem retribusi ini adalah berupa perubahan atau peningkatan sistem retribusi yang saat ini dilakukan secara manual dengan sistem retribusi yang berbasis pada penerapan komputer atau teknologi. Penerapan teknologi pada sistem retribusi obyek wisata tidak hanya berupa pada penjualan tiket masuk, tetapi juga berupa pada sistem pengawasan dilapangan serta pemantauan arus lalu lintas yang menuju obyek wisata. Sehingga permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan karena faktor lemahnya pengawasan atau kemacetan yang diakibatkan pada antrean masuk obyek wisata dapat diantisipasi secepat mungkin.